



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI WIBOWO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **216601**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **890.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/172 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **225.400.000**

1. MOTOR, BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ MOBIL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. MOTOR, VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **11.120.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **85.500.000**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **----**

Sub Total

Rp. **1.212.020.000**

III. HUTANG

Rp. **369.588.572**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. **842.431.428**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.